

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai implikasi ekstensifikasi pengenaan pajak penghasilan atas instrumen reksa dana saham ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya :

**Tabel II.1**

**Matriks Perbandingan**

Keterangan	Abdul Muthalib (Maksi FE-UI,2005)	Muhammad Irzan Syuhada (MM FE-UI,2006)
Judul	Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Tingkat Kinerja Reksadana Saham Periode 1998-2004	Pengaruh Pergerakan IHSG, SBI, Kurs Tukar, terhadap Kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran di Indonesia. (Studi Empiris 2000-2005)
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel makro ekonomi yang ada terhadap kinerja reksadana saham</li><li>Menguji dan mengetahui variabel-variabel makroekonomi manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja reksadana saham</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengukur kinerja reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran di Indonesia selama periode Januari 2000-Desember 2005 dengan menggunakan return dari NAB/unit</li><li>Melihat pengaruh pergerakan SBI dan Kurs Rupiah terhadap US Dollar dan NAB/unit dari reksadana saham, pendapatan</li></ol>

		tetap dan campuran
Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan Kuantitatif</li> <li>b. Jenis Penelitian adalah deskriptif ; cross sectional</li> <li>c. Studi Literatur dan Studi Lapangan (berupa data sekunder)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan Kuantitatif</li> <li>b. Jenis penelitian adalah eksploratif ; cross sectional</li> <li>c. Studi Literatur dan Studi Lapangan (berupa data sekunder)</li> </ul>
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terdapat pengaruh secara simltan dari variabel-variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan pendapatan nasional bersih, Pertumbuhan jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi,tingkat suku bunga SBI dan perubahan nilai Rupiah terhadap Kurs Dollar terhadap tingkat kinerja reksadana saham dalam menghasilkan return NAB</li> <li>b. Terdapat pengaruh secara parsial/individu dari variabel-variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan pendapatan nasional bersih terhadap tingkat kinerja reksadana saham dalam menghasilkan return NAB</li> </ul>	<p>Penelitian menggunakan data NAB dengan interval bulanan dari masing-masing reksadana serta data pendukung lainnya. Pada data NAB reksadana harus memenuhi asumsi-asumsi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang diteliti merupakan data dari produk reksadana yang masih aktif diperdagangkan pada periode Januari 2000-Desember 2005 dan masih terdaftar di Bapepam</li> <li>b. Data yang diteliti yaitu NAB/unit dari produk-produk reksadana.Kinerja Manajer Investasi dengan menggunakan return.</li> <li>c. Analisis mengobservasi hubungan antara kinerja reksadana dengan variabel makro ekonomi yang</li> </ul>

	<p>c. Hasil Penelitian ini menggambarkan keadaan Pasar Modal di Indonesia khususnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar variabel makro ekonomi yang diuji ternyata hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap tingkat pergerakan pengembalian investasi reksadana saham, bahkan diantaranya menunjukkan pola hubungan yang tidak konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi seperti tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar misalnya. Anomali tersebut diduga terjadi karena sistem investasi dan perekonomian di Indonesia pada umumnya tidak stabil, kurangnya kepercayaan investor terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.</p>	<p>dibatasi hanya IHSG, kurs tukar Rupiah Indonesia terhadap US Dollar, tingkat suku bunga SBI 1 bulan. Adapun kinerja reksadana yang diobservasi merupakan return dari NAB/unit dari reksadana saham, tetap dan campuran.</p>
--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti

Penelitian mengenai implikasi pajak penghasilan atas instrumen reksa dana saham belum pernah dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi pajak penghasilan pada instrumen reksa dana saham mengingat instrumen ini memiliki risiko dan return yang cukup tinggi dibanding instrumen reksa dana lainnya. Penelitian ini dilakukan karena mengingat upaya pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi pajak penghasilan atas reksa dana yang akan berimplikasi langsung pada investor dan Manajer Investasi sebagai pengelola dana.

### **A.1 Investasi**

Penghasilan dari modal merupakan salah satu objek pajak. Modal dapat memberikan penghasilan jika diinvestasikan. Menurut Malkiel yang dimaksud dengan investasi adalah :

*”Method of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predictable income (dividen, interest or rentals) and/or appreciation over the long term”.<sup>7</sup>*

Seperti yang dijabarkan diatas bahwa investasi adalah sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memprediksi masa depan. Investasi yang dimaksud adalah investasi jangka panjang. Pengertian tersebut selanjutnya dipertajam oleh Frank Reilly yang menyatakan bahwa :

---

<sup>7</sup> Burton G. Malkiel, *A Random Walk Down Wall Street, including A life-cycle Guide to Personal Investing*, (New York :W.W.Norton & Company 1991),26.

<sup>8</sup> Frank K Reilly, *Investments*, Third Edition, (Orlando : The Dryden Press International Edition 1992),6.

*“ Current commitment of dollars for period of time in order to derive future payments that will compensate the investor for  
(1) the time the fund are committed  
(2) the expected rate of inflation and  
(3) the uncertainty of the future payments.”*<sup>8</sup>

Seperti yang dijelaskan diatas investasi adalah komitmen terhadap sejumlah uang pada saat ini untuk suatu periode tertentu untuk memperoleh pembayaran pada masa mendatang yang akan mengkompensasi investor untuk:

- (1) waktu dana tersebut dilaksanakan ;
- (2) tingkat inflasi yang diharapkan.; dan
- (3) ketidakpastian pembayaran di masa datang

Modal dan waktu yang tepat adalah kunci untuk melakukan investasi.

Investasi juga dapat didefinisikan sebagai menggunakan uang untuk memperoleh lebih banyak uang dengan resiko paling kecil.<sup>9</sup> Jones mendefinisikan investasi sebagai *“commitment of funds to one more assets that will be held over some future period”*<sup>10</sup>. Definisi lain dari investasi menurut Frederick Amling yaitu :

*“Investment may be defined as the purchase by an individual or institution of a financial or real asset that produces a return proportional to the risk assumed over a long period of time”*<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>R.J.Shook, *Wall Street Dictionary, terjemahan Roy Sembel*, (Jakarta : PT. Erlangga 2002),286.

<sup>10</sup>Charles P.Jones, *Investment Analysis and Management 9<sup>th</sup> ed*, (New York : John Wiley and Sons 2004), 8.

<sup>11</sup>Frederick Amling, *Investments an Introduction to Analysis & Management 6th ed*, (New Jersey :Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989),7.

Jadi Investasi menurut Jones adalah dana yang ditanamkan investor pada suatu asset untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi bertujuan memberikan nilai tambahan terhadap aset yang kita miliki saat ini. Sedangkan investasi menurut Frederick Amling yaitu dalam proses investasi ,selalu ada ketidakpastian yang dapat mereduksi nilai aset yang kita miliki yaitu resiko. Makin besar investasi yang kita tanam makin besar risiko yang harus kita hadapi. Makin tinggi tingkat pengembalian yang kita harapkan,makin besar pula risiko yang harus kita hadapi.

Dari maksud definisi di atas terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam investasi. Pertama adalah modal yang menjadi unsur utama dari investasi dan diharapkan dapat berkembang. Kedua, hasil atau imbal hasil (return/rate of return) yang diharapkan akan didapat sebagai konsekuensi atas modal. Imbal hasil adalah perubahan nilai asset investor pada saat periode tertentu . Ketiga, risiko yang menjadi unsur ketidakpastian dalam investasi. Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari hasil yang diterima dengan yang diekspektasikan.

Dalam hal menentukan kebijakan investasi maka hendaknya harus mengetahui tujuan investasi.Tujuan melakukan investasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi pada masa datang baik berupa penerimaan tunai maupun kenaikan nilai investasi. Apabila kita telah lebih mendalam lagi,maka ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan investasi,diantaranya :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara mempertahankan tingkat pendapatannya

yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang dan meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu.

- b. Mengurangi tekanan inflasi, seseorang dapat terhindar dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya inflasi apabila ia melakukan investasi ke dalam kepemilikan perusahaan atau objek lainnya
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi pada bidang-bidang usaha tertentu di dalam negerinya banyak negara memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas perpajakan <sup>12</sup>

Pada dasarnya tujuan investasi pada tiap-tiap individu adalah berbeda. Sebelum melakukan investasi, seorang investor harus mengetahui apa yang ingin dicapai dengan investasi yang dilakukannya, berapa penghasilan yang ingin diperoleh, berapa lama investasi akan dilakukan, serta berapa risiko yang akan ditanggungnya. Dalam skripsi ini pengertian investasi dibatasi dalam cakupan investasi financial.

## **A.2 Reksa dana**

Dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat harapan hidup, makin banyak pula orang yang harus memikirkan masa depan saat penghasilan umumnya mulai menurun sementara kebutuhan terus meningkat. Salah satu bentuk investasi finansial yang sedang digemari masyarakat adalah reksa dana. Reksa dana adalah

---

<sup>12</sup> Daulat Pohan, “*Estimasi volatilitas Reksadana Saham Sebagai Pertimbangan Keputusan Investasi(perbandingan Model ARCH/GARCH)*,” Tesis (Jakarta : MM FE-UI 2004), 17.

wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan.<sup>13</sup>

Secara umum pengertian reksa dana yang berasal dari kata "*Mutual Funds*" adalah salah satu bentuk investasi dimana para investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana dan kemudian himpunan dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi, ataupun melalui tabungan atau sertifikat deposito di bank-bank, kumpulan investasi tersebut dinamakan portofolio investasi.

Bruce Jacobs seorang konsultan finansial di Florida mengatakan bahwa reksadana adalah :

*" A mutual fund is a collection of stocks, bonds, or other securities purchased by a pool of individual investors and managed by a professional investment company."*<sup>14</sup>

Menurut Bruce, reksa dana adalah bentuk pengumpulan dana dari masyarakat/investor yang diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi atau bentuk lain instrument financial yang dikelola oleh perusahaan investasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri utama dari reksadana adalah :

- a. Reksadana dapat berbentuk perseroan (PT) atau Kontrak Investasi Kolektif
- b. Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat
- c. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi
- d. Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio

---

<sup>13</sup>Marzuki Usman M.A, *Bunga Rampai Reksadana*, (Jakarta :PT. Balai Pustaka, 1998),.6.

<sup>14</sup> Bruce Jacobs, *All About Mutual Funds from The Inside Out*, (USA :Irwin Professional Publishing 1994),8.

Reksadana sebagai media investasi mensyaratkan dua hal. Pertama, menempatkan uang dengan siap menanggung risiko dan berharap memperoleh hasil. Kedua, membiarkan waktu bekerja. Dalam hal ini prinsipnya adalah semakin lama dana berputar maka risikonya semakin kecil dan potensi hasilnya akan semakin besar.

### **A.3 Reksadana Saham dan Pasar Modal**

Salah satu instrumen investasi dalam reksa dana adalah saham. Saham sebagai instrumen investasi adalah sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.<sup>15</sup>

Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, di mana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham. Karakteristik saham adalah sangat fluktuatif, investasi jangka panjang, resiko lebih tinggi dan punya hak suara dalam RUPS.

Jadi pengertian Reksa Dana Saham menurut Eko Priyo dan Ubaidillah adalah :

” Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas ”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Benjamin Graham, *The Intelligent Investor*, terjemahan, Rahmat Febrianto, (Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi 2003), 122.

<sup>16</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 72.

<sup>17</sup> Peter S. Rose, *Money and Capital Market*, International Edition (New York : McGraw-Hill, 1994), 9.

<sup>18</sup> Drs. Marzuki Usman. MA, Op. Cit, 70.

Menurut Peter S. Rose pengertian Pasar Modal adalah "*Capital Market is designed to finance long-term investment by businesses, governments, and households.*"<sup>17</sup> Peter S. Rose mengatakan bahwa Pasar Modal memang sudah diarahkan sebagai investasi instrument financial jangka panjang dan merupakan sumber pembiayaan bagi dunia bisnis, pemerintah maupun rumah tangga. Pasar Modal (*capital market*) adalah Pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial (saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain).<sup>18</sup>

#### **A.4 Kebijakan Pajak (*tax policy*)**

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan. Menurut Raymond A. Bauer sebagaimana dikutip oleh Dunn perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki.<sup>19</sup> Adapun proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

---

<sup>19</sup>William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 1.

implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.<sup>20</sup> Secara ilmiah kebijakan memiliki unsur-unsur yang esensial yaitu *goal* atau tujuan, *plans* atau proposal, program, *decision* atau keputusan, dan efek.<sup>21</sup>

Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi.<sup>22</sup> Kebijakan pajak menurut Mansury adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terhutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terhutang.<sup>23</sup> Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 22.

<sup>21</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 37.

<sup>22</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999), 1.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 1.

<sup>24</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 38.

Perencanaan suatu kebijakan pajak harus memperhatikan pembatasan dan perbaikan administrasi harus dilakukan agar implementasi desain kebijakan pajak dapat efektif diterapkan.<sup>25</sup> Permasalahan di dalam kebijakan pajak terjadi ketika proses penjaminan elastisitas dan respositivitas dari penghasilan yang potensial (*potential revenue*) kepada perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan tergantung kepada tarif dan basis pajak yang diaplikasikan dan ditetapkan.<sup>26</sup>

Fluktuasi Nilai saham yang tidak menentu itu dipengaruhi oleh beberapa variabel makro,yaitu salah satunya adalah Indeks Harga Saham Gabungan yang merupakan ukuran utama bagi saham-saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini merupakan ukuran tertimbang bagi nilai pasar (*market value weighted average index*) saham-saham yang terdaftar tersebut.Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dapat menjadi tolak ukur kestabilan bursa. Hendaknya kebijakan pajak atas instrumen reksa dana saham harus memperhatikan kestabilan bursa dengan memperhatikan pergerakan IHSG yang mempengaruhi ekspetasi investor dalam mengelola investasinya.

#### **A.5 Konsep Penghasilan**

Untuk memahami Pajak Penghasilan maka pengertian tentang penghasilan yang dikenakan pajak haruslah dipahami sehingga dapat diperoleh pengertian yang mendalam tentang penghasilan mana untuk dipakai sebagai dasar pengenaan pajak.

---

<sup>25</sup> Angelo G.A. Faria and M. Zohto Yocelik, *The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration*, hal. 267.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 267.

Konsep yang diterima secara umum oleh ahli ekonomi dalam bidang perpajakan, biasa disebut *SHS Concept* yang isinya antara lain:

- a. Schanz mengungkapkan *the Accretion Theory of Income* yang mengatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.
- b. Haig mengembangkan pengertian penghasilan untuk tujuan perpajakan sebagai *“the increase or accretion is one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consist of (a) money itself, or (b) anything susceptible of valuation in terms of money”*. Oleh karena itu penghasilan didapat pada saat tambahan kemampuan itu didapat dan bukan pada saat kemampuan dipakai guna menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan dan bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.
- c. Henry Simons juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan, pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan sebaiknya dirumuskan sebagai tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan itu berupa uang ataupun dapat dinilai dengan uang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Kevin Holmes, *The Concept Of Income A Multi-Disciplinary Analysis*, (Amsterdam: IBFD Publications BV, 2001), 57.

<sup>28</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996), 62.

Definisi mengenai penghasilan, bahwa yang menjadi Objek Pajak itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang telah direalisasikan.<sup>28</sup> Simons menyatakan pendapatnya bahwa suatu objek dapat dijadikan Objek Pajak apabila memenuhi persyaratan bahwa penghasilan yang diperoleh dapat dikuantifikasi dan merupakan Objek Pajak, adalah “...income must be conceived as something quantitative and objective. It must be measurable; indeed, the definition must indicate or clearly imply an actual procedure of measuring”<sup>29</sup>

#### **A.5.1 Subjek Pajak**

Menurut Mansury, pengenaan pajak didasarkan pada dua syarat, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Mansury mengelompokkan subjek Pajak Penghasilan menjadi dua dengan mengikuti masyarakat perpajakan internasional, yaitu subjek pajak orang pribadi dan badan. Yang menjadi subjek pajak adalah:<sup>30</sup>

- a. (i) orang pribadi atau perseorangan; (ii) warisan yang belum terbagi sebagai suatu keseluruhan menggantikan yang berhak;
- b. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komaditer, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan

---

<sup>29</sup> Kevin Holmes, *Op.cit*, 45.

<sup>30</sup> *Op. Cit*, 72.

lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

### **A.5.2Objek Pajak**

Definisi tentang penghasilan, bahwa yang menjadi objek pajak itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang telah direalisasikan.<sup>31</sup> Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, dividen dikelompokkan menjadi penghasilan dari modal, yaitu yang berupa harta gerak harta tak gerak seperti, bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

Kriteria penetapan Objek Pajak menurut Marsuni adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai nilai ekonomi atau dapat dinilai dengan uang  
Pajak berfungsi untuk mengisi kas negara, dengan demikian pajak harus dalam bentuk uang.
2. Tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian  
Kaitannya dengan fungsi budgeter, fungsi reguleren, dan fungsi redistribusi diharapkan tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian.
3. Tidak megurangi daya beli masyarakat

---

<sup>31</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996), 62.

Dipersyaratkan bahwa pajak sebagai peralihan kekayaan tidak sampai menimbulkan atau mempengaruhi daya beli seseorang atau badan.

4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Bahwa pemungutan pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan.

5. Memperhatikan aspek keadilan

Penetapan Objek Pajak harus jelas. Oleh karena pemungutan pajak didasarkan pada Objek Pajak, maka pemungutannya disesuaikan dengan keadaan Wajib Pajak.

6. Karena suatu sebab

Menurut Rochmat Soemitro sebab yang dapat dijadikan kriteria penetapan Objek Pajak adalah berupa perbuatan hukum, peristiwa hukum atau keadaan.

7. Potensinya memadai

Bahwa hasil dari pemungutan pajak berdasarkan pada objeknya cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengisi kas negara dan tidak mengurangi daya beli masyarakat, atau mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

8. Menjaga kelestarian lingkungan

Penetapan pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, artinya pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah atau masyarakat untuk merusak lingkungan.<sup>32</sup>

## A.6 Dividen

Ada dua macam kategori dari penghasilan (*income*) yaitu *active income*, *passive income*.<sup>33</sup> Penghasilan yang berasal dari harta (*passive income*) meliputi dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari penggunaan harta.<sup>34</sup> Secara umum, dividen adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham oleh perseroan terbatas atau persekutuan dengan penyertaan modal atau perusahaan yang terbagi atas saham-saham.<sup>35</sup>

Dividen yang dibagikan oleh perseroan dan diterima perseroan lain lazim disebut juga sebagai dividen antarperseroan (*intercorporate dividends*).<sup>36</sup> Indonesia menganut sistem klasikal (*Classical System*), penghasilan yang bersumber dari perseroan (*corporate source income*) dikenakan dua kali yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham (saat dibagikan sebagai dividen).<sup>37</sup>

Sistem Klasik (*Classical System*), yaitu pemegang saham dan perseroan yang

---

<sup>32</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 135.

<sup>33</sup> *Passive income*, <http://www.Answer.com>, diunduh pada 15 Februari 2008.

<sup>34</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 146.

<sup>35</sup> *Ibid*, 147.

<sup>36</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996), 76.

<sup>37</sup> Darussalam dan Danny Sepriadi, "Sistem Pemajakan atas Perseroan dan Orang Pribadi Sebagai Pemegang Sahamnya", dalam John Hutagaol, Darussalam, Danny Sepriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 33.

dipegang sahamnya merupakan kesatuan hukum yang masing-masing dikenakan pajak tersendiri (*separate entity approach*), walaupun secara ekonomis kedua Wajib Pajak ini sebenarnya satu kesatuan. Walaupun menganut Sistem Klasik, tetapi jika pemegang sahamnya juga adalah perseroan, maka penerapannya dapat dikecualikan. Integrasi atas keringanan dividen dapat dilakukan pada:

1. Tingkat Perseroan (*Corporate Level*)

Keringanan dividen pada tingkat perseroan dilakukan dengan cara mengurangi dividen terhadap penghasilan kena pajak perseroan, jadi perlakuannya sama dengan perlakuan biaya bunga yaitu diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sistem tersebut disebut dengan *dividend-deduction system*. Pendekatan lainnya disebut sebagai *split-rate system*, berdasarkan pendekatan ini dividen yang dikenakan pajak berdasarkan tarif yang lebih rendah daripada tarif untuk laba yang tidak dibagi (*retained earning*).

2. Tingkat Pemegang Saham (*Corporate Shareholder Level*)

Keringanan dividen dilakukan secara sistematis berdasarkan sistem imputasi (*imputation system*). Menurut Charles E. McLure sistem imputasi merupakan metode keringanan dividen di mana sebagian atau seluruh dividen yang dibagikan "ditambahkan" kepada pemilik perseroan dan pajak yang dikenakan atas perseroan tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan yang terutang dari pemilik perseroan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 29

Secara ekonomi menurut Zvi Bodie bahwa hasil penjualan kembali atau *redemption* merupakan dividen apabila memperoleh keuntungan setelah dikurangi oleh semua biaya atas fee untuk manajer investasi..

*"...the cumulative value of three funds, all of which start with \$10,000 and earn an annual 12% return on mutualfund investment before fees. Fund A has total operating expenses of 0,5% and no charges. Fund B has no load but has 1% in management expenses and 0,5% in fees. Finally fund C has 1% in management expenses, no charges, but assesses an 8% front-end load on purchases as well as reinvested **dividends**. We assume the **dividend yield** on mutual fund is 5%."*<sup>39</sup>

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh Reksa Dana yang berasal dari investasi untuk kepentingan pemodal dapat berupa :

1. Dividen dari perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia;
2. Bunga obligasi; dan
3. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas, sepanjang seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperolehnya dibagikan kepada para pemodal sebagai bagian keuntungan atau dividen.<sup>40</sup>

Ketentuan ini menganggap bahwa perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi para pemodal (investor) khususnya bagi pemodal kecil, perusahaan Reksa Dana merupakan salah satu pilihan aman untuk melakukan investasi atau menanamkan modalnya. Ketentuan di atas dapat diartikan juga bahwa apabila penghasilan netto reksa dana dibagikan kepada para pemodal, maka hal itu hanya

---

<sup>39</sup> Zvi Bodie, *Investment Third Edition*, (USA: Richard D. Irwin a Time Mirror Higher Education Group, 1996), 110

<sup>40</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996), 83.

sekedar wahana untuk mendapatkan penghasilan, yang selanjutnya diteruskan langsung kepada para pemodal, yaitu Wajib Pajak yang sebenarnya menikmati tambahan kemampuan ekonomis.<sup>41</sup>

Menurut Rimsky dividen dapat dikatakan bahwa pengertian dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>42</sup> Sedangkan penghasilan dividen adalah penghasilan yang diterima oleh para pemegang saham atau pemegang polis asuransi, termasuk pembagian dan pengembalian sisa hasil usaha koperasi yang diterima pengurus dan anggota koperasi.<sup>43</sup> Kategori dividen menurut versi pasal 4 ayat 1 huruf g adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun
2. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan/investor yang bersangkutan.
3. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
4. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
5. Pembagian laba dalam bentuk saham atau *cash*<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid,84.

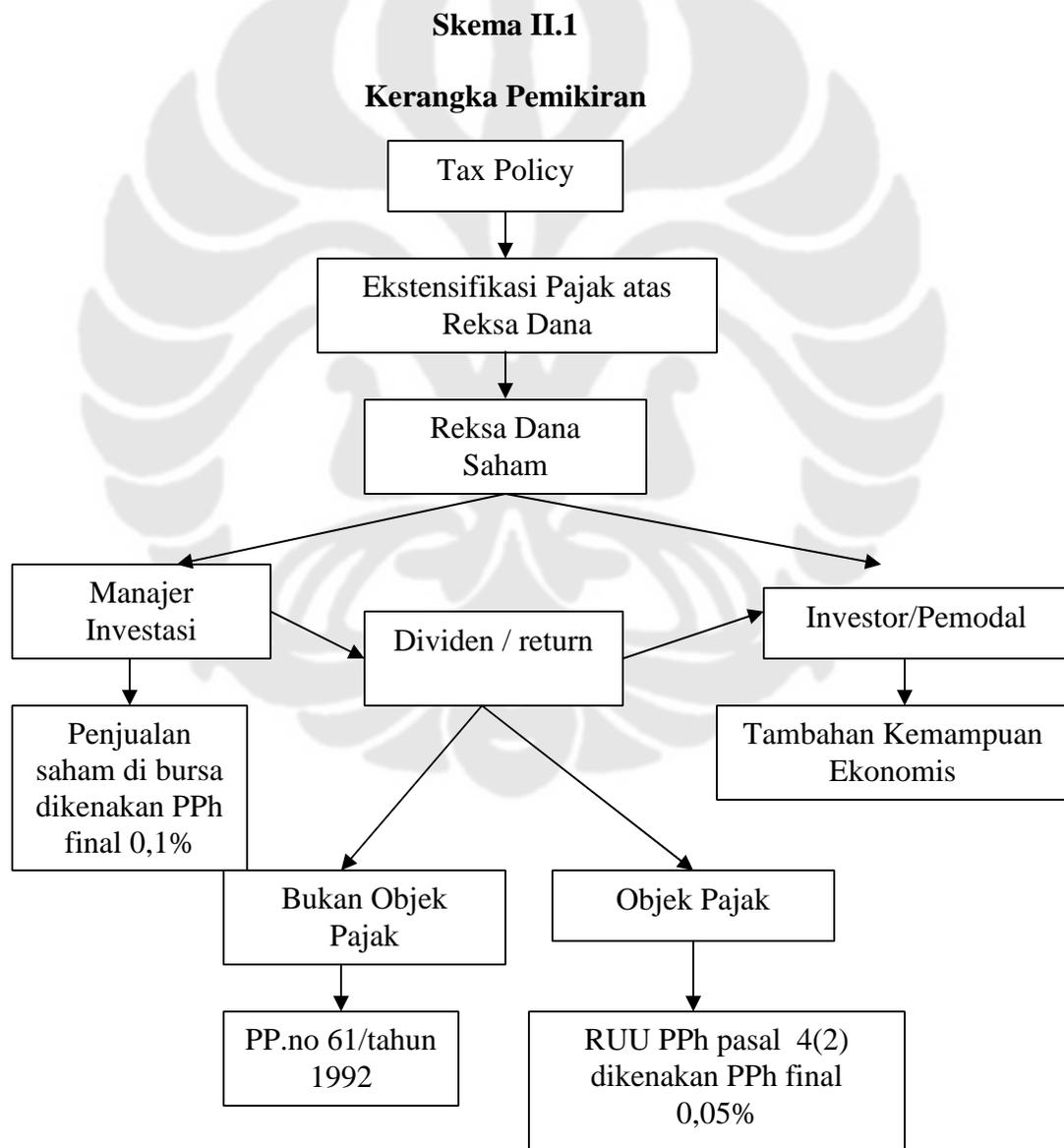
<sup>42</sup> Rimsky K.Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2005),213

<sup>43</sup> Ibid,214

<sup>44</sup> Ibid,214

## B. Kerangka Pemikiran

Implikasi penerapan pajak yang tercantum dalam RUU PPh pasal 4 ayat 2 akan sangat mempengaruhi perkembangan Reksadana selanjutnya. Salah satunya adalah terjadinya pajak berganda pada instrumen reksadana saham. Dan hingga saat ini reksadana masih diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber dana jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut Skema Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini :



Sumber : Diolah oleh peneliti

## C. Metode Penelitian

### C. 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas penelitian ini, pertama-tama penulis akan menguraikan pengertian-pengertian reksadana, jenis-jenis reksadana dan dampak ekonomi atas pengenaan pajak atas reksadana terutama reksadana saham.

Berkaitan dengan pendekatan kualitatif Neuman mengatakan :

*"....data for qualitative researches sometimes is in the form of numbers, more often it includes written or spoken words, actions, sounds, symbols, physical objects, or visual images (e.g., maps, photographs, videos, etc.)"*<sup>45</sup>

Berdasarkan kutipan di atas Neuman mengatakan secara umum bahwa pendekatan kualitatif itu bisa dalam bentuk angka walaupun lebih sering dalam bentuk literatur, kejadian nyata di lapangan, gambar, suara atau simbol-simbol.

### C. 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang ini. Tujuan utama

---

<sup>45</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Method Qualitative and Quantitative Approach*, fourth edition, (USA : Allyn & Bacon 2000),158

menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan memeriksa sebab-akibat dari suatu gejala tertentu.

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif maka penulis dapat menggambarkan dan menganalisa bagaimana efek yang ditimbulkan atas ekstensifikasi pajak terhadap reksadana saham.

Menurut manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian dalam rangka pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.

Menurut pada dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan pada suatu saat tertentu dan bukan disengaja melakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.<sup>46</sup>

### **C. 3. Metode dan Strategi Penelitian**

Menurut Patton data kualitatif terbagi menjadi tiga bentuk yaitu wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan dokumen (*documents*).<sup>47</sup> Penyusunan penulisan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

#### **1. Studi Literatur**

Studi literatur yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, diantaranya melalui buku-buku bacaan,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 106.

<sup>47</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (USA: Sage Publication Inc, 2002), hal 4.

Undang-Undang, majalah, jurnal, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara, pertama dengan observasi langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat langsung kondisi ruangan kerja dan tempat penyimpanan dokumen. Kedua, melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan guna mengumpulkan data primer dan informasi dengan menggunakan pedoman wawancara.

### **C.4. Hipotesis Kerja**

Hipotesis kerja menurut peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa rencana pemerintah untuk mengenakan pajak final untuk reksa dana sebagai upaya ekstensifikasi pajak penghasilan, akan berimplikasi pajak berganda terhadap instrument Reksa Dana Saham. Hipotesa lainnya bahwa saat ini penerapan sistem klasikal dalam pemungutan dividen, menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak.

### C. 5. Narasumber/informan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara dengan narasumber/informan dari berbagai pihak yang berkompeten. Diantaranya adalah :

- a. Kasubdib Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi pajak atas reksadana, waktu yang tepat untuk dilaksanakan dan implikasi terhadap reksadana saham apabila dilaksanakan.
- b. Presiden Direktur Mandiri Sekuritas, wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah pengenaan pajak atas reksadana bila diterapkan akan mempengaruhi kinerja manajer investasi melalui return yang akan dihasilkan atau NAB/unit dan pendapat tentang pro kontra masalah ekstensifikasi ini.
- c. Dirut BEI , wawancara dilakukan untuk mengetahui situasi pasar modal saat ini dan pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan terhadap NAB/unit pada Reksadana Saham.
- d. Kepala Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi BAPEPAM, wawancara dilakukan untuk mengetahui perkembangan industri reksadana saham dan dampak ekstensifikasi pajak atas reksadana terhadap kinerja Manajer Investasi yang menghasilkan NAB/unit dibawah maupun diatas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

- e. Akademisi, wawancara dilakukan untuk mengetahui konsep dividen yang diperoleh investor melalui proses redemption dalam reksadana saham.
- f. Investor, wawancara dilakukan untuk mengetahui keuntungan instrumen reksadana saham dan pendapat atas wacana ekstensifikasi pajak penghasilan atas reksa dana.

### **C. 6. Pembatasan Penelitian**

Pembatasan penelitian ini hanya dilakukan pada reksadana saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas. Reksadana saham ini merupakan bentuk investasi yang memiliki persamaan dengan penjualan dan pembelian saham di bursa efek melalui Manajer Investasi.